Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas

YUVENSIVS E.S.MANDONSA

INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA indonesia

Yuvensius13@gmail.com

ABSTRAK

This paper will discuss the Pancasila is a comfortable space for the development of unity in diversity as the basis of national identity awareness will thrive indoors Pancasila. Therefore, the Pancasila and Unity in Diversity is kondusif atmosphere for the development of democracy in Indonesia. Democracy is not the cultural nuances of the implementation of democratic ideology therefore be associated with the positive law of a State, as a product of cultural values. Pancasila as a set of cultural values of the nation, is a special distinction (*diferentia specifica*) with another democracy.

Keywords: Pancasila, Unity in Diversity, Democracy, Ideology.

Pendahuluan

Prematurkah Demokrasi di Indonesia Predikat demokrasi identik dengan konotasi modern, oleh karenanya suatu negara akan menjadi bangga jika negaranya telah menggunakan predikat demokrasi. Demokrasi merupakan produk peradaban, dan peradaban merupakan produk basis kesadaran identitas suatu bangsa. Dari hipotesa ini maka saya tertarik untuk mengajukan dua pertanyaan: Pertama, apakah peradaban yang kita miliki telah mampu melahirkan sikap demokratis? Hal ini mengingat bahwa peradaban yang modernlah yang melahirkan sikap demokratis, dan bukan sebaliknya. Modern, dalam hal ini merujuk pada pola pikir rasional, (bukan emosional dan bukan primordial) sebagai konsekuensi logis kondisi pendidikan yang berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat. Sehingga tidak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi baru bisa terlaksana dengan baik

jika minimal income-perkapita masyarakatnya 3500 US dollar. Kedua, apakah demokrasi yang baik harus seperti yang berlaku di Negara Eropa Barat atau Amerika? Peradaban sebagai embrio lahirnya demokrasi merupakan cerminan dari basis kesadaran identitas suatu komunitas (bangsa). Oleh karenanya demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, oleh karenanya demokrasi yang baik harus merujuk pada nilai-nilai yang berkembang pada bangsa yang bersangkutan, bukan merujuk pada negara lain Basis kesadaran identitas sebagai embrio lahirnya peradaban, sedangkan jika kita melihat basis kesadaran identitas bangsa Barat (AS dan Eropa Barat) sangatlah jelas perbedaannya, Negara Barat: individualis, humanis, sekuler, sedangkan masyarakat Indonesia: individu-sosial, humanis-religious, agamis. Sehingga sangatlah wajar jika pada tataran

implementasinya demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, karena memang basis kesadaran identitas keduanya sangatlah berbeda.

Konsep Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat (demos dan kratos). Sebagai konsep demokrasi berlaku umum, dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di Barat. Untuk Indonesia, maka demokrasi adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai way of life, merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur dan sebagai way of life demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi adalah nuansanya budaya, oleh karenanya budaya Barat yang berintikan, pada basis kesadaran identitasnya adalah monism (individualis), sekuler, antroposentris, yang pada gilirannya melahirkan sistem demokrasi liberal tentu akan berbeda dengan Indonesia (demokrasi Pancasila), dimana budayanya

berdasarkan pada kesadaran identitas monopluralisme (individu-social, jasmani-rokhani, makhluk pribadimakhluk Tuhan), religious, theologies.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna:

Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila diatasnya dan menjiwai sila dibawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif, majority, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang, sedangkan pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada

demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigma bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Pancasila sebagai struktur kognitif Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakininya mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila, baik

Sebagai struktur kognitif, Pancasila berisi pengetahuan tentang norma-norma mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan Pancasila, karena didalamnya terkandung cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan serta memberikan orientasi tentang dunia seisinya, memberikan arahan bagi kehidupan yang berjuang melawan berbagai bentuk penderitaan. Pancasila berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan NKRI maupun dalam proses pencapaian tujuan

NKRI. Hal ini berarti tujuan negara yang dirumuskan sebagai “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, mutlak harus sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Secara historis fungsi dan peran Pancasila, mengalami tahapan-tahapan dan setiap tahapan masing-masing mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda, sehingga menuntut visi yang khas pula. (Soeryanto Poespowardoyo,1991) Tahapan pertama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu, dan telah menunjukkan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan serta penyelenggaraan

Setiap bangsa memiliki wawasan (cara pandang) terhadap diri dan lingkungannya, demikian juga bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya maupun lingkungannya. Terhadap dirinya,

Tahapan kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, namun bukan berarti menegasikan tahap sebelumnya, sehingga pada tahap ke dua ini, rasa persatuan tetap harus dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahap ini timbul kesadaran bahwa ekonomi perlu ditangani dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa, dan membangun bangsa berarti memerangi kemiskinan. Dan

langkah tersebut memerlukan stabilitas politik sebagai prasaratnya, maka keamanan menjadi tolok ukur untuk memberi peluang pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Dan kesemuanya itu menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang memberikan kewenangan yang pasti bagi pemerintah untuk mengambil langkah serta kebijakan dalam mewujudkan cita-cita yang telah disepakati bersama. Namun pada tahapan ini, kurang adanya kepekaan sosial, sehingga masalah-masalah sosial tidak dilihat secara realistis dan kurang dibahas secara kritis, dan semata-mata secara ideologis. Pancasila menjadi alat pragmatism untuk semata-mata membuat legitimasi diri. Tahapan ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka (tanpa menghilangkan tahapan sebelumnya), tahapan ini memberikan orientasi kedepan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi. Pengaruh negatif globalisasi bisa diatasi dengan tetap mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan nasional yang dinamis. Terbuka, bukan berarti merubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit sehingga mampu memecahkan permasalahan. Perubahan hanya dimungkinkan pada tataran nilai instrumental dan nilai operasional.

Mengingat nilai-nilai tersebut masih bersifat umum, abstrak maka agar lebih mudah dilaksanakan langkah pertama adalah

konkritisasi nilai-nilai diatas, dengan mengacu pada 3 pendekatan, yakni:

- Pendekatan teleologis, yakni pendekatan yang diarahkan pada apa tujuan kehidupan berbangsa, bernegara ini, artinya tujuan yang kita sepakati (tercermin dalam Pembukaan UUD 1945) haruslah tidak bertentangan atau sejalan dan mencerminkan norm-norm sebagai hasil konkritisasi dari nilai-nilai yang dimaksud diatas.
- Pendekatan etis, yakni pendekatan yang diarahkan pada ukuran baik-buruk, apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk menurut nilai-nilai yang dimaksud diatas. (pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan).
- Pendekatan integratif yakni bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai bagian dari sistem bangsa maupun negara, apakah lebih mengutamakan kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan pribadi. Menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya, manusia adalah pribadi, namun juga merupakan relasi.

Dalam rangka menggunakan ketiga pendekatan tersebut, senantiasa berpijak pada kondisi obyektif yakni bentuk wilayah (kepulauan) dan kondisi bangsa Indonesia (heterogen). Dengan demikian

pada saat kita menentukan tujuan berbangsa dan bernegara ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan dan heterogenitas yang ada. Demikian juga saat kita menentukan ukuran benar-salah atau baik-buruk mengacu pada kondisi obyektif masyarakat Indonesia (humanis religius). Selanjutnya bagaimana hubungan antara warga-negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara, tentunya merujuk pada konsep Bhineka Tunggal Ika yang beralaskan konsep kebangsaan kita. (kesatuan wilayah, kesatuan nasib, kesatuan tujuan). Kesemuanya itu baru akan efektif jika didukung oleh aturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila perlu memberikan ruang untuk terciptanya dinamisasi kehidupan masyarakat, demokratisasi, dan fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat.

Kesimpulan

Setiap bangsa memiliki wawasan (cara pandang) terhadap diri dan lingkungannya, demikian juga bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya maupun lingkungannya. Terhadap dirinya, bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah Indonesia adalah kepulauan, dan bangsa Indonesia adalah heterogen. Sebagai negara kepulauan (wilayahnya) yang heterogen

(bangsanya), Pancasila sebagai sarana perekat dan Bhineka Tunggal Ika sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaannya. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup bangsa yang wilayahnya kepulauan dan bangsanya heterogen. Pancasila merupakan ruang yang nyaman bagi berkembangnya keanekaragaman (heterogenitas) dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis kesadaran identitas bangsa yang menempati ruang Pancasila. Implementasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang berupa hukum positif tidak akan bermanfaat tanpa diikuti oleh penegakan hukum. Suatu norma, nilai, aturan, hukum baru berguna jika ada penegakan hukum, dan hal ini akan tercipta jika penegak hukum berwibawa. Heterogenitas adalah de facto dan demokrasi Pancasila adalah solusi dan ruang dalam mengembangkan heterogenitas dan Bhineka Tunggal Ika adalah jiwa yang mendorong perkembangan demokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

As"ad Said Ali, 2010, Negara Pancasila Jalan Kemasalahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, Ideologi Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Khaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yoyakarta. Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pancuran Tujuh, Jakarta.

Salim, Emil, 1979, Sistem Ekonomi Pancasila, LP3ES, Jakarta.

Wahyudi, Agus, 2006, Ideologi Pancasila:Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politik? Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinis (eds). Restorasi Pancasila:Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, FISIP UI, Depok, Jakarta.